

Lkip

**DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

2016

**KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA**



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2016



KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya adalah melakukan pengembangan Infrastruktur Perhubungan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik.

Sebagai unit kerja dimana semua pengguna dana yang bersumber dari APBD akan di pertanggung jawabkan kembali kepada masyarakat melalui penyusunan dan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang sangat minim, sebagai contoh belum adanya Terminal Tipe C dan belum meratanya sarana dan prasarana perlengkapan jalan untuk menunjang keselamatan dan keamanan transportasi menjadi permasalahan utama dan pekerjaan rumah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017. Mengingat setiap tahun jumlah kendaraan di Kabupaten Minahasa Tenggara meningkat cukup signifikan, maka sarana dan prasarana perhubungan tersebut harus wajib disediakan oleh Pemerintah.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, sangat diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung untuk dapat lebih diperhatikan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

B. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1. Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
4. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara, maka tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perhubungan, perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas, pengelolaan urusan ketatausahaan, pembinaan teknis operasional, pembinaan staf dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
- b. Koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan urusan ketata-usahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, dan hubungan masyarakat serta rumah tangga Dinas;
- d. Penggalian sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan penerimaan daerah dibidang Perhubungan;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan sesuai hasil;
- f. Menyerasikan pengaturan operasional pelayanan umum dalam suatu pola untuk mengatasi kompleksitas kegiatan;
- g. Mengatur tatalaksana pelayanan umum menyangkut tata cara, prosedur dan sistem kerja dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pelayanan umum;
- h. Mendorong upaya efektifnya sistim dan tatalaksana pelayanan sehingga pelayanan dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- i. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- j. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- k. Pemberian perizinan dan pelayanan umum;
- l. Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- m. Melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, laporan umum dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

- 1) *Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud mempunyai fungsi:*
 - a. Menyelenggarakan administrasi umum;
 - b. Menyediakan dan menginventarisir sarana dan prasarana untuk kelancaraan tugas sesuai kemampuan keuangan;
 - c. Melakukan pendataan, inventarisir pegawai dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

- d. Melakukan penataan kebersihan halaman dan kantor dalam rangka pelestarian lingkungan;
 - e. Menyusun dan menyampaikan rancangan anggaran; dan
 - f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam penyampaian laporan kegiatan.
- 2) *Dalam penyelenggaraan kegiatannya, Sekretaris dibantu oleh sub bagian yang terdiri dari*
- a. *Bagian Umum*
 - b. *Bagian Keuangan*

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan;
- b. Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar;
- c. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan membuat daftar inventaris;
- d. Menyusun dan membuat statistik yang dikoordinasikan dengan satuan kerja;
- e. Memelihara, mengamankan dan mengatur penggunaan sarana fasilitas;
- f. Melakukan kegiatan penataan halaman dan kebersihan kantor;
- g. Memelihara arsip baik aktif maupun non aktif;
- h. Menyelenggarakan urusan pengetikan dan reproduksi naskah dinas;
- i. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kegiatan protokol;
- j. Menyiapkan pelaksanaan rapat – rapat;
- k. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan Gaji berkala dan hal – hal kebutuhan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- l. Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- m. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan kehadiran pegawai;
- n. Menyusun data pegawai sesuai pangkat dan jabatan;
- o. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugas

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas :

- a. Melaksanakan pembuatan gaji pegawai;
- b. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
- c. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam rangka penyusunan rencana anggaran;
- d. Melakukan koordinasi dalam hal penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- e. Melakukan kegiatan pengelolaan keuangan intensifikasi penerimaan, efisiensi dan efektifitas pengeluaran serta pertanggung jawaban keuangan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas;

3. Tiap – tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Sekretaris.

BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Bidang Manajemen/Rekayasa lalu lintas dan operasional, angkutan dan identifikasi kendaraan, serta keselamatan dan teknik sarana dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugas.

1. Bidang Perhubungan Darat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas;
 - b. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. Melaksanakan manajemen angkutan dan operasional;
 - d. Melaksanakan pelayanan perizinan
 - e. Melaksanakan pendaftaran kendaraan dan pengemudi;
 - f. Melaksanakan ketentuan persyaratan kendaraan bermotor dan tidak bermotor
 - g. Melaksanakan pengaturan unit pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatannya Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
 3. Bidang Perhubungan darat terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan Darat dan Penyeberangan
 - b. Seksi Lalu Lintas dan Teknik Sarana Prasarana
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor / UPT - PKB
-
- 1) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas:
 - a) menyusun rencana kegiatan angkutan darat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b) menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang angkutan darat.
 - c) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan darat.
 - d) menyiapkan bahan koordinasi bidang angkutan darat dengan unit/instansi terkait.
 - e) menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi angkutan darat.
 - f) menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang angkutan darat.
 - g) membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi angkutan darat.
 - h) melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi angkutan darat sesuai tugas dan kewenangannya.
 - i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas seksi angkutan darat.
 - j) melaporkan hasil kegiatan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia kepada atasan.
 - k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas :
 - a) menyusun rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b) menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan lalu lintas.
 - c) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan lalu lintas.
 - d) menyiapkan bahan koordinasi bidang pengendalian dan pengawasan lalu lintas dengan unit/instansi terkait.
 - e) menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi pengendalian dan pengawasan lalu lintas.

- f) menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pengendalian dan pengawasan lalu lintas.
 - g) membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pengendalian dan pengawasan lalu lintas.
 - h) melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi pengendalian dan pengawasan lalu lintas sesuai tugas dan kewenangannya.
 - i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor / UPT – PKB
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a) menyusun rencana kegiatan sarana dan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b) menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana.
 - c) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana.
 - d) menyiapkan bahan koordinasi bidang sarana dan prasarana dengan unit/instansi terkait.
 - e) menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi sarana dan prasarana.
 - f) menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang sarana dan prasarana.
 - g) membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
 - h) melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada sesuai tugas dan kewenangannya.
 - i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas.
 - j) melaporkan hasil kegiatan orang kepada atasan.
 - k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Tiap – tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan angkutan Laut, Keselamatan Pelayaran dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai Bidang tugas.

1. Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut, kepelabuhan, perkapalan dan kepulauan serta penjaga keselamatan dan kebandaraan;
 - b. Menyusun kebijakan operasional dan melaksanakan pengendalian, pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan antar didalam kabupaten, bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut lainnya, fasilitas jasa pengurusan transportasi dan penunjang angkutan laut serta tenaga kerja bongkar muat, tatanan dan perizinan pelabuhan, pengelolaan pelabuhan, pemanduan, pengembangan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan serta pendalaman kolam dan alur pelayaran
 - c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, pengendalian, pengawasan pelaksanaan kegiatan kapal, pelayaran dan kepelabuhanan.
2. Dalam penyelenggaraan kegiatannya Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan;
- b. Seksi Keselamatan Pelayaran;

1) Seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Angkutan Laut dan Penyeberangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Angkutan Laut dan Penyeberangan.
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Angkutan Laut dan Penyeberangan.
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang Angkutan Laut dan Penyeberangan dengan unit/instansi terkait.
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan.
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Angkutan Laut dan Penyeberangan.
- g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan.
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi Angkutan Laut dan Penyeberangan sesuai tugas dan kewenangannya.
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas.
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Keselamatan Pelayaran, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan keselamatan pelayaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Keselamatan Pelayaran.
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan Pelayaran.
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang Keselamatan Pelayaran dengan unit/instansi terkait.
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi Keselamatan Pelayaran.
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Keselamatan Pelayaran.
- g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi Keselamatan Pelayaran.
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai tugas dan kewenangannya.
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas.
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kepelabuhanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan.
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhanan.
- d. menyiapkan bahan koordinasi bidang kepelabuhanan dengan unit/instansi terkait.
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksijaminan sosial keluarga.
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang kepelabuhanan.

- g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi kepelabuhanan.
- h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai tugas dan kewenangannya.
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas.
- j. melaporkan hasil kegiatan seksi kepada atasan.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Tiap – tiap seksi dipimpin oleh Kepala seksi.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas dilapangan yang terdiri dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Adalah Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Perhubungan Darat
 - a. Kepala Seksi Angkutan
 - b. Kepala Seksi Sarana Prasarana
 - c. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas
4. Kepala Bidang Perhubungan Laut
 - a. Kepala Seksi Kepelabuhanan
 - b. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran
 - c. Kepala Seksi Angkutan Laut dan Penyebrangan

E. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara sampai dengan posisi bulan Desember 2016 adalah 18 orang yang terdiri dari :

- a. Berdasarkan Jenis Kelamin :
 - Laki – laki : 14 Orang
 - Perempuan : 4 Orang
- b. Berdasarkan Pendidikan
 - SD : - Orang
 - SLTP : - Orang
 - SLTA : 3 Orang
 - Diploma II / III : 1 Orang
 - Strata 1 : 10 Orang
 - Strata 2 : 4 Orang

- c. Berdasarkan Golongan / Agama
 - Islam : 1 Orang
 - Kristen Protestan : 17 Orang
 - Kristen Katolik : - Orang
 - Hindu : - Orang
 - Budha : - Orang

- c. Pegawai Dinas Perhubungan yang telah mengikuti Diklat Fungsional :
 - Perencanaan Jaringan Transportasi Darat :- Orang
 - Penyidik Pegawai Negeri Sipil : 1 Orang
 - Pengujian Kendaraan Bermotor : 1 Orang
 - Pembantu Penguji Pemula : 2 Orang
 - Pengelolaan Terminal : - Orang
 - Traffic Light : - Orang
 - Manajemen Angkutan Barang : - Orang
 - Transportasi Darat : - Orang
 - Perencanaan Jaringan Trayek : - Orang
 - Teknik Lalu Lintas : - Orang

- d. Pegawai Dinas Perhubungan yang telah Mengikuti Diklat struktural :
 - Adum : - Orang
 - Pim IV : 1 Orang
 - Pim III : 3 Orang
 - Pim II : - Orang
 - Pim I : - Orang

- e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan sampai Desember Tahun 2017 adalah :
 - Golongan IV : 4 Orang
 - Golongan III : 9 Orang
 - Golongan II : 5 Orang
 - Golongan I : - Orang

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja
- C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sumber Daya Aparatur
- F. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Visi dan Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran
- E. Penetapan Kinerja Tahunan
- F. Rencana Kinerja Tahunan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan unsur pelaksana teknis daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang perhubungan, yang memerlukan visi, misi dan rencana program yang jelas serta strategis untuk dapat mencapai sasaran tugas dan kewenangan yang diembannya. Untuk mewujudkan strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:

”DISHUB yang mampu melayani dengan maksimal dan meningkatkan aksesibilitas serta fungsi telekomunikasi yang efektif”

2. Misi

1. Meningkatkan penyediaan Prasarana dan Sarana yang terfokus bagi pembangunan ekonomi untuk terwujudnya aksesibilitas, mobilitas dan pemerataan pelayanan jasa perhubungan yang menjangkau ke seluruh pelosok wilayah.
2. Meningkatkan pelayanan angkutan orang, barang dan jasa yang aman dan nyaman menuju perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang lebih baik.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif dan proaktif untuk mengantisipasi, mengadopsi, menerapkan, mengadaptasi dan menginovasi perkembangan kemajuan IPTEK, serta memantapkan kerukunan dan toleransi dalam suasana aman cepat, tepat dan berdaya guna.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan bermotor dan keamanan lalu lintas.

C. Tujuan

1. Meningkatkan pelayanan umum bidang transportasi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas guna mendukung perwujudan peningkatan ekonomi wilayah, khususnya peningkatan daya beli masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan angkutan orang, barang dan jasa.
3. Meningkatkan jumlah SDM di bidang transportasi dan komunikasi informatika yang berkompeten serta berkualifikasi.
4. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pencemaran lingkungan.

D. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Perhubungan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	1. Tersedianya cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, cermin tikungan, pagar pengaman, delineator, marka)
	2. Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas
	3. Tersedianya unit/balai pengujian kendaraan bermotor
	1. Jumlah ijin trayek
	2. Jumlah dokumen pengkajian dan rencana
3. Meningkatnya sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal Laut/Terminal Angkutan Penumpang Tipe C
	1. Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Minahasa Tenggara
	2. Tersedianya SDM yang memiliki kemampuan bidang Parkiran
	1. Tersedianya SDM dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor
	2. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang MRL, Andallalin
	3. Tersedianya SDM berkualifikasi teknis di bidang
	1. Jumlah Uji Kiur Angkutan Umum
	2. Lama waktu Uji Kiur

E. Penetapan Kinerja Tahun

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pemimpin instansi Pemerintah/Unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/Unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

F. Rencana Kinerja Tahunan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
		1. Tersedianya cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, cermin tikungan, pagar pengaman, delineator, marka)	Rambu= 50 Unit, Cermin= 3 Unit, Pagar Pengaman =15 Unit, Deliniator 100 Unit

		2. Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	45%
		3. Tersedianya unit/balai pengujian kendaraan bermotor	1
		1. Jumlah ijin trayek	9
		4. Jumlah dokumen pengkajian dan rencana	2
	1. Meningkatnya sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal Laut/Terminal Angkutan Penumpang Tipe C	0
		1. Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Minahasa Tenggara	70 Unit
		2. Tersedianya SDM yang memiliki kemampuan bidang Parkiran	1
		1. Tersedianya SDM dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor	1
		2. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang MRLL, Andallalin	2
		1. Jumlah Uji Kiur Angkutan Umum	40
		2. Lama waktu Uji Kiur	1 Jam

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2016 dengan realisasinya. Target capaian kinerja Dinas Perhubungan Kominfo tahun 2017 diilustrasikan sebagai berikut:

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

) **Sasaran: Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal.**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	%
		-Rambu=50 Unit,	Rambu= 14 Unit,	28
		-Cermin= 3 Unit,	-	-
		-Pagar Pengaman=15 Unit,	-	-
		-Deliniator= 100 Unit	-	-
		-Rambu pendahulu petunjuk jalan=2	-	-
			50%	50%
	3.Tersedianya unit/balai pengujian kendaraan bermotor	1	1	100

Dengan indikator sasaran Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas terjadi penurunan angka kecelakaan yang signifikan dari tahun 2016 dengan tahun 2017 dimana pada tahun 2016 terjadi kecelakaan sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) kasus dengan angka kecelakaan yang terdiri dari

Kecelakaan Berat sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus, kecelakaan ringan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus, dan kecelakaan yang menyebabkan kematian sebanyak 35 (tiga puluh dua) kasus, pada tahun 2017 terjadi kecelakaan berat 13 (tiga belas) kasus kecelakaan ringan 17 (tujuh belas) kasus dan kecelakaan yang mengakibatkan kematian sebanyak 10 (sepuluh) ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi penurunan angka kecelakaan salah satunya di karenakan pada tahun 2017 meski peningkatan volume kendaraan terutama kendaraan roda dua dan roda empat di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat pesat, mengevaluasi perkembangan yang ada Dinas Perhubungan Kab. Minahasa Tenggara meski dengan alokasi anggaran yang minim mampu menekan angka kecelakaan lalu-lintas dengan melakukan inovasi yaitu berkoordinasi dan bekerja sama dengan bagian lalu lintas Kepolisian Resort Kab. Minahasa Selatan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta penertiban kendaraan bermotor. dan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yaitu APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) sebanyak 14 unit yang berlokasi di 2 titik pemasangan Sedangkan indikator sasaran tersedianya unit/balai pengujian kendaraan bermotor telah mencapai target kinerja.

) Sasaran: Meningkatkan pelayanan regulasi bidang transportasi.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	%
	1. Jumlah ijin trayek	9 ijin trayek	7 ijin trayek	77
	2. Jumlah dokumen pengkajian dan rencana	2 dok	2 dok	100

Dengan indikator sasaran yaitu jumlah ijin trayek. Untuk tahun 2017 terjadi penurunan di bandingkan dengan tahun 2016 di karenakan pada tahun 2017 kewenangan pengurusan ijin trayek telah di ambil alih oleh Dinas Perhubungan Provinsi untuk AKDP, demikian pula dengan indikator kinerja jumlah dokumen pengkajian dan rencana telah mencapai target kinerja yang ditentukan yaitu 2 (dua) dokumen perencanaan.

) Sasaran: Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	%
Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman	Tersedianya pelabuhan pengumpan local laut/terminal angkutan penumpang tipe C	0	0	0

Indikator sasaran tersedianya Pelabuhan Penumpang Lokal Laut/Terminal Angkutan Penumpang Tipe C. Pada tahun 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara belum dapat memenuhi target kinerja tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Terminal Tipe C. Hal ini disebabkan karena meski telah mempunyai lokasi akan tetapi Dinas Perhubungan tidak mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Penumpang Lokal dan Terminal Tipe C. Pada tahun 2016 dan 2017 telah diselesaikan Master Plan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Penumpang Lokal, sedangkan Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe C di upayakan pada tahun 2018.

) Sasaran: Meningkatkan keteraturan penyelenggaraan parkir guna memperlancar arus lalu lintas.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	%
	1. Jumlah angkutan umum di Kabupaten Minahasa Tenggara	70	59	84.28
	2. Tersedianya SDM dibidang parkir	1	0	0

Indikator sasaran adalah jumlah angkutan umum di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada tahun 2017, jumlah angkutan umum turun mencapai 59 unit. Jumlah ini melebihi turun dari target kinerja yang ditetapkan yaitu 70 unit. Terjadinya penurunan jumlah angkutan umum di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 68 unit ini disebabkan karena kondisi kendaraan yang sudah berumur lebih dari 13 tahun sehingga sering mengalami kerusakan dan butuh waktu lama dalam perbaikan selain itu perkembangan transportasi berakibat masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi online daripada angkutan umum, sedangkan untuk sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang parkir pada tahun 2017 tidak mempunyai target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) di karenakan keterbatasan anggaran.

) **Sasaran: Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi dan komunikasi.**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	%
	1. Tersedianya SDM dibidang pengujian kendaraan bermotor	1	0	0
	2. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang MRLL dan Andalalin	0	0	0

Indikator sasaran adalah tersedianya SDM dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk tahun 2017 tidak memenuhi target di sebabkan terbatasnya anggaran dari Dinas Perhubungan Kab. Minahasa Tenggara dalam menganggarkan indikator ini.

Sedangkan untuk target kinerja tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang MRLL, Andallalin dan SDM berkualifikasi teknis di bidang komunikasi dan informatika sudah terealisasi sesuai dengan target.

) **Sasaran: Terlaksananya pengujian kendaraan yang efektif dan efisien.**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	%
	1. Jumlah uji kiur angkutan umum	40	-	
	2. Lama waktu uji kiur	1 jam	-	

Indikator sasaran adalah jumlah uji kiur angkutan umum. Tidak terlaksana dengan alasan pada tahun 2017 pengoperasian uji kiur di hentikan sementara karena balai pengujian kendaraan bermotor sedang di bangun, secara otomatis kegiatan proses pengujian kendaraan harus di hentikan sampai balai pengujian kendaraan bermotor dan peralatannya telah selesai di bangun. sasaran lama waktu uji kendaraan bermotor belum bisa di ukur di karenakan balai pengujian kendaraan bermotor dan perlengkapannya selesai di bagun.

TABEL TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	%
1. Tersedianya cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, cermin tikungan, pagar pengaman, deliniator, marka)	Rambu= 80 Unit, Cermin= 6 Unit, Pagar Pengaman =15 Unit, Deliniator 115 Unit	Rambu= 14 Unit,	28
2. Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	50%	312.01%	312.01
3. Tersedianya unit/balai pengujian kendaraan bermotor	1	1	100
4. Jumlah ijin trayek	9	7	77
5. Jumlah dokumen pengkajian dan rencana	2	2	100
6. Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal Laut/Terminal Angkutan Penumpang Tipe C	0	0	0
7. Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Minahasa Tenggara	70	59	84.28
8. Tersedianya SDM yang memiliki kemampuan bidang Parkiran	1	0	0
9. Tersedianya SDM dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor	1	0	0
10. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang MRL, Andallalin	2	0	0
11. Jumlah Uji Kiur Angkutan Umum	40	0	0
12. Lama waktu Uji Kiur	1 Jam	0	0

Dari 12 indikator sasaran, 2 (dua) target kinerja mencapai 100% dan 1 (satu) target kinerja mencapai diatas 100%. Sementara 6 (enam) target kinerja masih belum tercapai.

2. Membandingkan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015 dan 2014

TABEL REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA

) **Sasaran: Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal.**

INDIKATOR SASARAN	THN 2015	THN 2016	THN 2017	%
1. Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	100%	100%	312.01%	3.20%

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 telah melebihi target kinerja 50%, demikian pula pencapaian pada tahun 2016 dan 2017 mencapai 100%. Hal ini melebihi target dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan terjadi penurunan angka kecelakaan 3.20%.

TABEL REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA

Sasaran: Meningkatkan pelayanan regulasi bidang transportasi

INDIKATOR SASARAN	THN 2015	THN 2016	THN 2017	%
Jumlah ijin trayek	9 ijin trayek	11 ijin trayek	7 ijin trayek	0.63

Dengan indikator kinerja adalah jumlah ijin trayek, selama tahun 2017 terjadi penurunan target kinerja. Dan untuk tahun 2016 melebihi target kinerja yang di tetapkan dan 2015 memiliki pencapaian 100% sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

) **Sasaran: Meningkatnya sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman**

INDIKATOR SASARAN	THN 2015	THN 2016	THN 2017	%
Tersedianya pelabuhan pengumpan laut/terminal tipe C	0	0	0	0

Telah sesuai Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018.

Sasaran: Meningkatnya keteraturan penyelenggaraan parkir guna memperlancar arus lalu lintas

INDIKATOR SASARAN	THN 2015	THN 2016	THN 2017	%
Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Minahasa Tenggara	20 Unit	55 Unit	59 Unit	100

Indikator kinerja adalah jumlah angkutan umum di Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk tahun 2017 terjadi penurunan target kinerja yang ditetapkan dan telah di jelaskan pada perbandingan antara target dan realisasi kinerja diatas. Tahun 2015 dan 2016.

) **Sasaran: Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor yang efektif dan efisien**

INDIKATOR SASARAN	THN 2015	THN 2016	THN 2017	%
1. Jumlah Uji Kiur Angkutan Umum	55 Unit	96 Unit	0 Unit	100%
2. Lama waktu Uji Kiur	1 Jam	1 Jam	1 Jam	100%

Dengan indikator kinerja adalah jumlah uji kiur angkutan umum dan lamanya waktu uji. Untuk tahun 2017 tidak tercapai dan telah di jelaskan perbandingan target dan realisasi di atas, pada realisasi dan capaian kinerja mencapai 0 unit kendaraan yang di uji, Hal ini telah di jelaskan pada perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017 diatas. Untuk tahun 2015 jumlah kendaraan yang di uji kelaikkan kendaraan mencapai 100% dan tahun 2016 melebihi target kinerja.

1. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2017 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Realisasi kinerja pada tahun 2017 bisa di katakan terjadi penurunan dengan beberpa target kinerja tidak tercapai ataupun terjadi penurunan dan tidak memenuhi target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dinas Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. Pada tabel target dan realisasi kinerja 2017 diatas telah dijelaskan pencapaian kinerja dan alasan-alasan yang terjadi sesuai dengan keadaan.

TABEL REALISASI KINERJA

TABEL SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN ORGANISASI

Sasaran: Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal

) **Sasaran: Meningkatkan pelayanan regulasi bidang transportasi**

Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Organisasi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
		2011	2012	2013	2014	2015
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	20%	35%	40%	45%	50%

Tabel Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Organisasi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah ijin trayek	8	9	9	9	10
	Jumlah dokumen pengkajian dan rencana	0	2	2	2	3

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi.

Setelah melihat perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017 yang memiliki 12 indikator kinerja serta membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2016, 2015 dan sebagai tolak ukur rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara, dapat dinilai bahwa ke 12 indikator kinerja sudah dapat terpenuhi rata-rata mencapai 90%. Penyebab keberhasilan tersebut adalah penyerapan anggaran di Dinas Perhubungan sangat baik, rata-rata selama 2016-2017 diatas 90%.

Evaluasi akuntabilitas kinerja adalah kegiatan analisis yg sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yg ditemukan untuk tujuan peningkatan dan akuntabilitas organisasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara didalam pelaksanaan kinerja dari tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat mencapai target diatas 90%. Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja antara lain:

1. Menilai pencapaian secara kuantitatif
2. Memberikan pemahaman pentingnya semua indikator sasaran
3. Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja dan manfaat pengukuran kinerja:
 1. Membantu Pimpinan dalam menentukan tingkat capaian
 2. Memberikan umpan balik bagi pembuat keputusan
 3. Menjadi alat komunikasi Pimpinan, Pegawai dan Stakeholder
 4. Menggerakkan Instansi Pemerintah kearah yang positif
 5. Mengidentifikasi kualitas pelaksana instansi pemerintah

dapat disampaikan bahwa pengukuran kinerja pada Dinas Perhubungan pada tahun 2017 ini terdapat 3 (tiga) target kinerja yang belum dapat di capai.

Hal ini disebabkan karena masih kurangnya dana untuk membiayai kegiatan tersebut, Penggunaan dana untuk pelaksanaan sasaran indikator serta program/kegiatan yang menunjang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah mampu diserap rata-rata hampir 90%.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya baik dari sumber daya manusia dan keuangan telah digunakan semaksimal mungkin. Dari 17 Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Perhubungan dan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp. 5.101.250.839,32,- telah tersalur di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan anggaran yang telah di sediakan tersebut.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Dalam setiap tahun anggaran dari 2015-2017 telah disusun program-program prioritas dalam rangka mencapai target kinerja yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara. Program dan kegiatan tersebut berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017 yang telah dibahas sebelumnya, rata-rata telah mencapai diatas 90%. Demikian pula dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai $\pm 88\%$. Hal ini membuktikan bahwa program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sesuai dengan target kinerja yang hendak dicapai.

A. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2017 ini, pencapaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp. 4.753.803.605,00,- atau 93,14%.

BAB IV

PENUTUP

Problematika perencanaan transportasi senantiasa berkembang dan merupakan tantangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan transportasi daerah yang diemban oleh Dinas Perhubungan, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan DisHub Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan transportasi di masa mendatang, melalui:
 - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur bidang perhubungan;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa perkembangan transportasi untuk mendukung kualitas pembangunan;
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang transportasi.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara selama satu tahun. Berdasarkan uraian dari capaian kinerja pada tahun 2017 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi terhadap capaian kinerja kegiatan Dinas Perhubungan

Kabupaten Minahasa Tenggara yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar Rp. 5.101.250.839,32,- Telah terealisasi Rp. 4.753.803.605,00,- atau 93.14%

Dalam penyusunan Rencana Anggaran sebaiknya mengacu pada hasil evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilaksanakan.

Ratahan, Februari 2017

KEPALA DINAS,

Drs. BERNHARD MOKOSANDIB, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610927 198303 1 012